

2022 Recap & Review Laporan Kinerja
Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan:

MENJAWAB TANTANGAN, MENEMPA TUJUAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, sebagai bagian dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2024.

Laporan ini merupakan wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan kepada mitra kerja dan masyarakat dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, yang diarahkan untuk mengetahui tantangan dan peluang dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hal ini digunakan sebagai bahan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP terus melakukan transformasi pengawasan dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mencapai target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Namun demikian, beberapa indikator memerlukan usaha yang lebih gigih untuk mencapainya.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bukti komitmen dan dukungan aktif dari seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan kerja sama yang baik dengan seluruh mitra kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami terus memiliki komitmen yang tinggi agar **BPKP Kian Bermakna** bagi mitra kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan pembangunan nasional dan wilayah yang berkeadilan.

Banjarbaru, 6 Januari 2023

Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan,



Rudy M Harahap

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

VII

BAB I PENDAHULUAN

1

TUGAS DAN FUNGSI

2

STRUKTUR ORGANISASI

4

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

6

KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK BPKP

8

SISTEMATIKA PELAPORAN

9

BAB II RENCANA KERJA

10

TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

11

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

16

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

17

ANALISIS EFISIENSI

17

KINERJA LAINNYA

61

AKUNTABILITAS KEUANGAN

63

BAB IV PENUTUP

65

REALISASI KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatkannya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

18

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

23

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

27

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

33

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

39

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 3.1	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	18
Tabel 3.2	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	23
Tabel 3.3	Capaian IKK Sasaran Kegiatan Tahun 2022	27
Tabel 3.4	Ringkasan Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	28
Tabel 3.5	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	39
Tabel 3.6	Rincian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	43
Tabel 3.7	Rincian Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	45
Tabel 3.8	Rincian Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel	47
Tabel 3.9	Rincian Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai	48
Tabel 3.10	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	52
Tabel 3.11	Ringkasan nilai skor zona integritas unit kerja	53
Tabel 3.12	Realisasi penurunan dampak dan frekuensi risiko yang teridentifikasi	55
Tabel 3.13	Realisasi tindak pengendalian dari rencana tindak yang telah disusun	56
Tabel 3.14	Realisasi skor IKPA unit kerja	58
Tabel 3.15	Realisasi nilai pengelolaan BMN Unit Kerja	59
Tabel 3.16	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 Menurut Jenis Belanja	63
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 Menurut Program/ Kegiatan	63
Tabel 4.1	Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2021	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Target dan realisasi nilai skor zona integritas unit kerja	54
Grafik 3.2	Grafik 3.2 Target dan realisasi nilai SAKIP	55
Grafik 3.3	Grafik 3.3 Target dan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Eksternal	57
Grafik 3.4	Grafik 3.4 Target dan realisasi Skor IKPA Unit Kerja	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi SDM	5
Gambar 1.2	Strategi atas Arah Kebijakan	7
Gambar 1.3	Kegiatan dan Layanan Produk BPKP	8
Gambar 1.4	Sistematika Penyajian Laporan	9

(lembar ini sengaja dikosongkan)



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

1. AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH



PENYELAMATAN KEUANGAN

Rp 25 Triliun **92.663%**

OPTIMALISASI POTENSI PENERIMAAN DAERAH

Rp 3,3 M **447%**

EFISIENSI BELANJA

Rp 627 M **216%**



3. BADAN USAHA

BUMDES YANG MENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN
DARI TARGET SEBANYAK 38

52

BUMD BERKINERJA SEHAT
DARI TARGET SEBANYAK 11

12

BLUD BERKINERJA SEHAT
DARI TARGET SEBANYAK 2

3

BUMDES YANG BERKONTRIBUSI
PADA PEREKONOMIAN DESA
DARI TARGET SEBANYAK 3

3

5. PENGENDALIAN INTERN

DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET **145%**
REALISASI 29 TARGET 20

PROVINSI DENGAN MATURITAS SPIP LEVEL 3 **100%**
REALISASI 1 TARGET 1

KAB/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP LEVEL 3 **100%**
REALISASI 12 TARGET 12

DESA AKUNTABEL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN **100%**
REALISASI 20 TARGET 20

BUMD DENGAN MRI LEVEL 3 **100%**
REALISASI 1 TARGET 1

BLUD DENGAN MRI LEVEL 3 **100%**
REALISASI 2 TARGET 2

APIP PROVINSI DENGAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3 **100%**
REALISASI 1 TARGET 1

APIP KAB/KOTA DENGAN KAPABILITAS APIP LEVEL 3 **85%**
REALISASI 6 TARGET 7

PEMDA AKUNTABEL DALAM KEUANGAN DAN KINERJA **75%**
REALISASI 3 TARGET 4

KAB/KOTA DENGAN MRI LEVEL 3 **33%**
REALISASI 1 TARGET 3

KETERANGAN :

● MEMENUHI TARGET ● TIDAK MEMENUHI TARGET

2. PEMBANGUNAN NASIONAL

125% REKOMENDASI STRATEGIS YANG
DITINDAKLANJUTI
TERCAPAI 100 DARI TARGET 80

HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
YANG TERSELESAIKAN **117%**
TERCAPAI 100 DARI TARGET 85

100% PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH
YANG DIAWASI
TERCAPAI 2 DARI TARGET 2

4. PENGENDALIAN KORUPSI

125% PEMANFAATAN HASIL PENGAWASAN
PREVENTIF DAN EDUKATIF
TERCAPAI 100% DARI TARGET 80%

100% PEMANFAATAN HASIL PENGAWASAN REPRESIF
DARI TARGET 100%

100% PEMDA YANG MENINDAKLANJUTI AOI
HASIL PENGUKURAN IEPK
TARGET 1 PEMDA

50% PEMDA DENGAN EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN KORUPSI BAIK
TERCAPAI 1 PEMDA DARI TARGET 2 PEMDA

6. TATA KELOLA UNIT KERJA

142% EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN

123% INDEKS KUALITAS LAYANAN

118% PENGELOLAAN BMN

112% ZONA INTEGRITAS

107% SAKIP

101% INDIKATOR KINERJA PELAKSANA ANGGARAN

100% PENYELESAIAN RTP

PENGHARGAAN

TERBAIK II DALAM KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
SE-PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022

DUKUNGAN, KERJASAMA DAN PENDAMPINGAN DALAM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN TABALONG

TERBAIK III PADA LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN
2022





BAB I

PENDAHULUAN

- A. TUGAS DAN FUNGSI
- B. STRUKTUR ORGANISASI
- C. ASPEK STRATEGIS NASIONAL
- D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK BPKP
- E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Dalam kedudukannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Secara khusus, kedudukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan

- kontrak kerja sama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
 6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
 7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
 8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
 9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yakni Rudy M. Harahap. Ph.D.. CGCAE, CRGP NIP 19690404 198903 1 001 berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-226/K/SU/2021 tanggal 8 April 2021.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.

Struktur organisasi terbaru Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP terdiri dari:

1. Kepala Perwakilan.
2. Bagian Umum, Sub Koordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2021 terdapat perampingan jabatan struktural di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pejabat fungsional, yaitu:

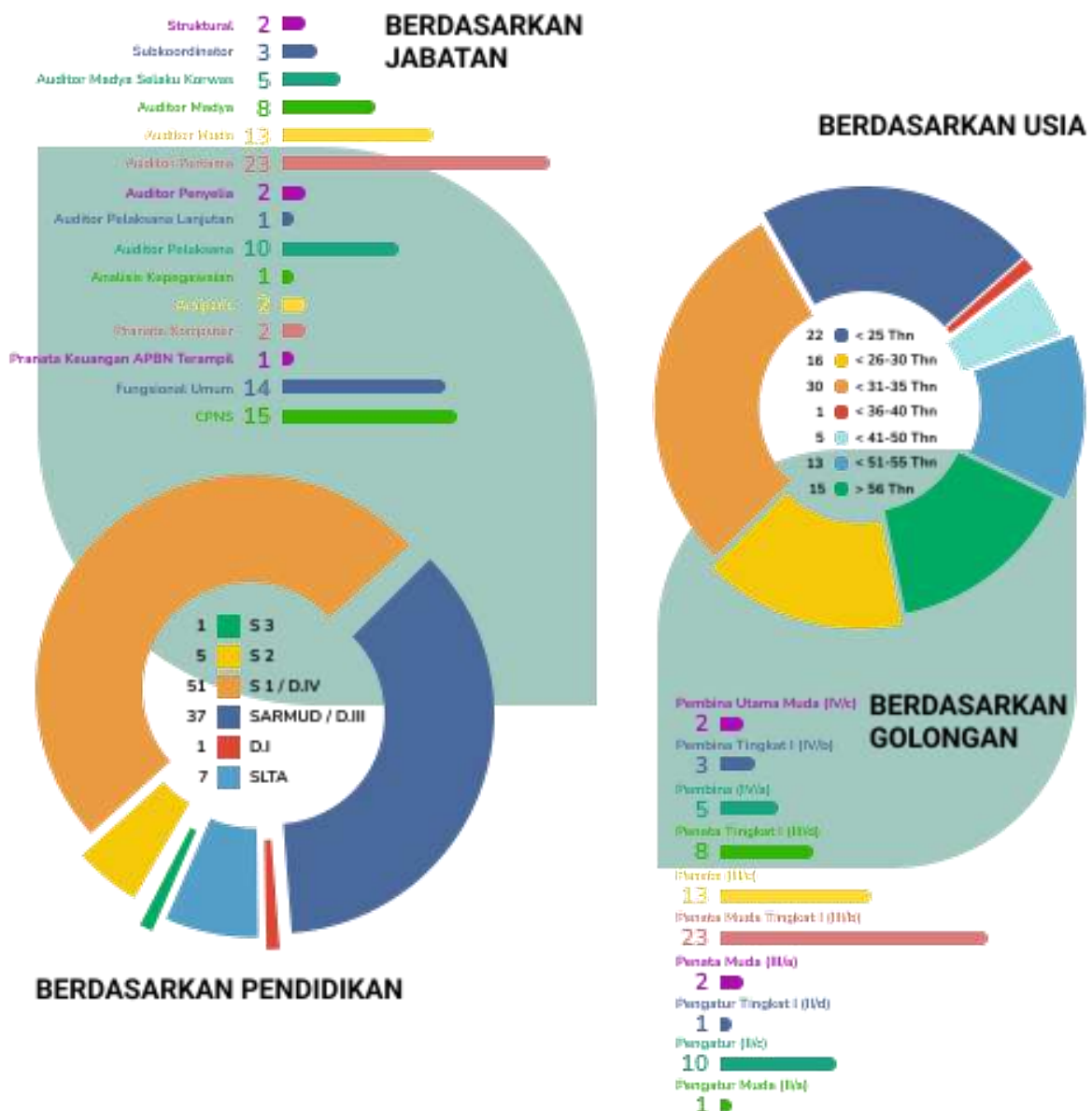
- Subbagian Umum menjadi Subkoordinator Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Muda.

- Subbagian Kepegawaian menjadi Subkoordinator Analis SDM Aparatur Muda.
- Subbagian Keuangan menjadi Subkoordinator Analis Pengelola Keuangan APBN Muda.

Sumber Daya Manusia Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2022 sebanyak 109 orang dengan rincian pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Komposisi SDM



C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi BPKP merupakan pendekatan pemecahan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan intern. Hal ini dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP mendapatkan amanah untuk melakukan pengawasan intern dan pembinaan SPIP.

1. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja di lingkungan BPKP menetapkan arah kebijakan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 yang selaras dengan arah kebijakan BPKP dengan mempertimbangkan tantangan dan permasalahan terkait upaya pencapaian sasaran strategis BPKP, yaitu:

- a. Meningkatnya akuntabilitas keuangan negara dan daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas badan usaha;
- d. Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi;
- e. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada Pemda dan badan usaha; dan
- f. Meningkatnya kualitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

2. STRATEGI PENGAWASAN

Strategi pengawasan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP:

Gambar 1.2. Strategi atas Arah Kebijakan



Pelaksanaan strategi tersebut berupa kegiatan pengawasan yang dimuat dalam dokumen perencanaan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) dan dokumen penganggaran (RKA-KL) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK BPKP

Gambar 1.3. Kegiatan dan Layanan Produk BPKP



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Gambar 1.4 Sistematika Penyajian Laporan





BAB II

RENCANA KINERJA

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPKP, Peraturan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi pengawasan BPKP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

1. PERNYATAAN VISI

Untuk melaksanakan amanah yang terkandung dalam peran dan fungsi BPKP dan dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan dan potensi permasalahan (risiko) yang dihadapi, BPKP selama periode Renstra Tahun 2020-2024 mengusung visi:

Menjadi Auditor Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik Dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP menempatkan visi BPKP tersebut sebagai visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan panduan organisasi dalam melaksanakan peran dan manfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. PERNYATAAN MISI

Untuk mengaktualisasikan visi di atas, BPKP selama periode Renstra Tahun 2020-2024 mengusung misi:

- *Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan*
- *Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.*

BPKP berperan memastikan ketercapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 melalui pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pembangunan nasional dan daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP memandang misi BPKP tersebut sebagai misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan panduan organisasi dalam melaksanakan peran dan manfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. TUJUAN

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP tersebut, tujuan BPKP pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (2024)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	21
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	IACM BPKP	Level 4
		Indeks RB	84
		Indeks Kesehatan	75

Sebagai auditor internal Presiden, BPKP bertugas melakukan pengawalan atas ketercapaian sasaran pembangunan nasional, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat terhadap masyarakat, dan mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang bersifat penjaminan (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting*).

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selaku unit kerja pada BPKP memandang tujuan BPKP tersebut sebagai tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang harus diwujudkan dan menjadi acuan dalam menyusun sasaran kegiatan dan penentuan arah kebijakan dan strategi serta kegiatan pengawasan yang tepat di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Sasaran Kegiatan

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan sebagai unit kerja eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan sasaran kegiatan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit kerja Eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan sasaran kegiatan.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, beserta target kinerja 2020-2024 tersaji pada Lampiran 1.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
	SATUAN	TOTAL
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah		
1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	743.00
1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	290.478.00
1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.000.00
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional		
2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	(%) Persen	85.00
2.2 Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2.00
2.3 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80.00
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha		
3.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11.00
3.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2.00
3.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	38.00
3.4 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	3.00
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi		
4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100.00
4.2 Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	80.00
4.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	2.00
4.4 Jumlah Pemda menindak lanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1.00
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU		
5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1.00
5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Pemkab/ Kota	7.00
5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1.00
5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Pemkab/ Kota	12.00
5.5 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI >= Level 3	Pemkab/ Kota	3.00
5.6 Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	4.00

SASARAN KEGIATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
		SATUAN	TOTAL
5.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20.00
5.8	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20.00
5.9	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	1.00
5.10	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	2.00
6. Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja			
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75.00
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82.00
6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70.00
6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100.00
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75.00
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95.00
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Tahun 2022
- B. Analisis Efisiensi
- C. Kinerja Lainnya
- D. Akuntabilitas Keuangan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan yang diambil dalam pencapaian sasaran kegiatan, serta penggunaan sumber daya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja dan menyajikan akuntabilitas kinerja tahun 2022.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut:

Semakin tinggi realisasi, capaian kerjanya semakin baik

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

B. ANALISIS EFISIENSI

SASARAN KEGIATAN 1

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah menunjukkan sebanyak tiga indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Notifikasi
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	743	3.324	447,37	✓
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	290.478	627.711	216,10	✓
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.000	25.019.096	92.663,32	✓

Uraian tiga indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut:

1.1 NILAI OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH YANG TEREALISASI

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah atas potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi.

Realiasi tahun 2022 adalah sebesar Rp3.324.059.815 atau mencapai 447,37% dari target sebesar Rp743.000.000.dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pengawasan atas Optimalisasi PAD Pajak Air Permukaan	2.656.847.432
2.	Evaluasi Optimalisasi PAD Tahun 2021 dan sampai dengan April 2022	285.303.171
3.	Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi OPAD Pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022	381.909.212
Jumlah		3.324.059.815

Realisasi indikator ini mengalami penurunan sebesar Rp70.431.000.000 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang mencapai Rp73.754.000.000 atau sebesar 14.238,22%.

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar Rp309.731.000.000, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 1,07%.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, antara lain kegiatan optimalisasi pajak air permukaan, evaluasi optimalisasi optimalisasi PAD, dan monitoring tindak lanjut evaluasi optimaliasasi PAD.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sudah melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap tata kelola Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan hasil pengawasan BPKP yang sebelumnya;
- b. Adanya kesadaran dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah;
- c. Inovasi maupun pendekatan yang baru dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan kegiatan pengawasan, baik itu

assurance maupun *consulting* melalui peningkatan kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran, dan mempertahankan hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

1.2 NILAI EFISIENSI PENGELUARAN NEGARA DAN DAERAH

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun.

Realisasi tahun 2022 adalah sebesar Rp627.606.904.235,00 atau mencapai 216,06% dari target sebesar Rp290.478.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Audit Independen	87.058.796.00
2.	Reviu (P3DN Nasional)	18.958.126.809.00
3.	Evaluasi Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Tunjangan Profesi Guru, SPAM, Perencanaan dan Penganggaran APBD	327.423.317.501.00
4.	Pengawasan Reklamasi IUP Batubara	263.311.880.129.00
5.	Bimbingan Teknis	12.600.000.000.00
6.	Audit Kinerja	5.226.521.000.00
Jumlah		627.606.904.235.00

Realisasi indikator ini mengalami kenaikan sebesar Rp239.415.414.061,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp388.191.490.174,00 atau sebesar 208,09%.

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar Rp1.041.915.000.000,00, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 60,24%.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini, antara lain kegiatan audit pinjaman dan bantuan luar negeri, reviu P3DN, evaluasi atas kewajiban reklamasi ijin usaha penambangan batu bara, evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD, serta berbagai kegiatan bimbingan teknis.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan.

- b. Dukungan dari manajemen untuk senantiasa melakukan inovasi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Dukungan dari rendal dalam proses pelaksanaan penugasan berupa monitoring dan *Quality Assurance*.
- d. Pedoman pengawasan yang lebih berkualitas.
- e. Kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan metode pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan kompetensi auditor untuk lebih *agile*, dan melanjutkan hubungan baik dengan mitra.

1.3 NILAI PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Indikator nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah diukur dengan menjumlahkan temuan nilai belanja yang dikembalikan ke Kas Negara, termasuk denda yang dikenakan dan nilai aset yang dipulihkan.

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah sebesar Rp25.019.096.159.071,00 atau mencapai 92.663,32% dari target Perkin tahun 2022, yaitu sebesar Rp27.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penugasan Bidang IPP	24.995.374.886.438,00
2.	Penugasan Bidang Investigasi	23.721.272.633,00
Jumlah		25.019.096.159.071,00

Realisasi indikator ini apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp25.377.275.976,00 atau sebesar 1626,75%, maka mengalami kenaikan sebesar Rp24.993.718.883.095,00.

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar Rp3.281.056.000.000,00, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 761,81%.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini, antara lain kegiatan audit keuangan pinjaman dan bantuan luar negeri, kegiatan pengawasan

atas PNBP, kegiatan pengawasan Covid 19 – pembayaran klaim RS, dan kegiatan audit investgatif.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan.
- b. Sinergi yang baik antara BPKP dengan Kementerian ESDM dan Aparat Penegak Hukum.
- c. Manajemen perubahan yang dikontribusi oleh kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pedoman pengawasan yang lebih berkualitas.
- e. Kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan metode pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan kompetensi auditor untuk lebih *agile*, dan melanjutkan hubungan baik dengan mitra.

PENGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 20 SHP atau sebanyak 181,82% dari target 11 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp396.166.789,00 atau 99,81% dari anggaran Rp396.922.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 3727 OH atau 90,34% dari rencana sebanyak 4.125 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 181,82% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,81%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 1 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 181,82% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 90,34%.

SASARAN KEGIATAN 2

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional menunjukkan sebanyak tiga indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Sasaran Kegiatan Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
atas Pembangunan Nasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Notifikasi
2.1	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	Persen (%)	85	100	117.65	✓
2.2	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Topik APPD	2	2	100.00	✓
2.3	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen (%)	80	100	125	✓

Uraian tiga indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

2.1 PERSENTASE HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG DISELESAIKAN

Indikator ini diukur dengan membagi jumlah penugasan yang berhasil menyelesaikan HKP melalui kesepakatan penyelesaian terhadap total penugasan HKP.

Pada tahun 2022, realisasi persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan adalah sebesar 100% dari target sebesar 85%.

Realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 85%, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 117,65%.

Aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini, antara lain kegiatan evaluasi atas hambatan kelancaran pembangunan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya manajemen perubahan yang dikontribusi oleh kepemimpinan yang kondusif, penataan tatalaksana yang lebih baik, pedoman pengawasan yang lebih berkualitas, dan kepercayaan dari mitra kerja terhadap kompetensi BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melanjutkan hubungan baik dengan mitra serta meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan mediasi dan evaluasi.

2.2 JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH YANG DIAWASI

Indikator ini diukur dengan menjumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan APPD yang ditetapkan, yaitu Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara dan Pengawasan atas Optimalisasi PAD Pajak Air Permukaan.

Realisasi jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi adalah 2 atau mencapai 100% dari target. Indikator ini tidak ada pada tahun 2021 maupun pada Renstra Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas Pemenuhan Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Periode Tahun 2016 s.d. 2021.
- b. Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atas Pajak Air Permukaan (PAP) pada Provinsi Kalimantan Selatan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dari hasil audit BPKP.
- b. Adanya permintaan dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Nomor 050/0348/SET/BAPPEDA/2021 tanggal 14 Juli 2021 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Optimalisasi Pajak Air Permukaan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan mempertahankan hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kompetensi auditor guna menjaga kualitas hasil pengawasan.

2.3 PERSENTASE REKOMENDASI STRATEGIS YANG DITINDAKLANJUTI

Indikator ini diukur dengan membagi jumlah rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi strategis pada laporan gubernur.

Pada tahun 2022, persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti adalah 100% atau mencapai 125% dari target. Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 maupun dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja pada akhir triwulan III tahun 2022.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2022.
- b. Pemantauan atas Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja)
- c. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I s/d IV 2022.
- d. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan beberapa upaya, antara lain dengan menjaga kualitas rekomendasi sehingga bersifat strategis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, kegiatan yang bersifat monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan akan tetap dilakukan.

PENGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 46 SHP atau sebanyak 124,32% dari target 37 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp2.274.251.007,00 atau 99,89% dari anggaran Rp2.276.707.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 5964 OH atau 86,84% dari rencana sebanyak 6868 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 2 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 124,32% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,89%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 2 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 124,32% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 86,84%.

SASARAN KEGIATAN 3

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS BADAN USAHA



Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha menunjukkan sebanyak empat indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Capaian IKK Sasaran Kegiatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Notifikasi
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11	12	109.09	✓
3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	3	150.00	✓
3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	BUMDes	38	52	136.84	✓
3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	3	3	100.00	✓

3.1 JUMLAH BUMD DENGAN KINERJA SEHAT

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BUMD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pelaporan. Kriteria BUMD dengan kinerja sehat adalah memperoleh skor kinerja di atas 2,80 untuk BUMD Jasa Air dan di atas 65,00 untuk BUMD Aneka Usaha.

Pada tahun 2022, jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 12 BUMD atau mencapai 109,09% dari target. Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 1 BUMD, dengan ringkasan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Ringkasan Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

No	Nama BUMD	Skor	Tingkat Kesehatan
1.	PDAM Bandarmasih	3,80	Sehat
2.	PDAM Intan Banjar	2,99	Sehat
3.	PDAM Barito Kuala	2,84	Sehat
4.	PDAM Tanah Laut	3,31	Sehat
5.	PDAM Kotabaru	3,14	Sehat
6.	PDAM Tanah Bumbu	2,90	Sehat
7.	PDAM Tapin	3,28	Sehat
8.	PDAM Hulu Sungai Selatan	3,46	Sehat
9.	PDAM Hulu Sungai Utara	2,90	Sehat
10.	PDAM Balangan	2,85	Sehat
11.	PDAM Tabalong	3,47	Sehat
12.	PD Pasar Bauntung Batuah	65,7	Sehat "A"

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 12 BUMD, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 100%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah evaluasi kinerja atas BUMD Jasa Air dan BUMD Aneka Usaha.

Dari hasil pengawasan atas 15 kegiatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

No	Area of Improvement	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kejadian
1	Rendahnya harga jual produk (air, batubara, jasa pelayanan) yang berlaku	15	14
2	Pemetaan risiko fraud belum dilakukan	15	15
3	Belum berperannya SPI dalam pengawasan internal	15	15
4	Belum jelasnya status badan hukum BUMD	15	10
5	Kualitas air di bawah standar	12	12
6	Tingkat kehilangan air di atas standar	12	11
7	Analisis <i>going concern</i> terganggu pada aspek keuangan	12	10

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada PDAM sehingga dapat berkinerja sehat.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan serta komitmen dari pengelola BUMD untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengkaji harga jual produk, melakukan pembinaan kepada pengelola

BUMD agar mampu melakukan pengendalian risiko *fraud*, meningkatkan fungsi dan peran Satuan Pengawas Internal perusahaan, dan menetapkan status badan hukum BUMD.

3.2 JUMLAH BLUD DENGAN KINERJA SEHAT

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BLUD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pelaporan. Kriteria BLUD dikatakan memiliki kinerja sehat apabila mendapat skor skor kinerja di atas 65,00.

Pada tahun 2022, jumlah BLUD dengan kinerja sehat sebanyak 3 BLUD atau mencapai 150% dari target. Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 2 BLUD dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BLUD	Skor	Tingkat Kesehatan
1.	RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar	77,47	Baik
2.	RSUD H. Boejasin Kabupaten Tanah Laut	74,70	Baik
3.	RSUD Idaman Kota Banjarbaru	76,70	Baik

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 2 BLUD, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 150%.

Realisasi kinerja dari realisasi sebanyak 3 BLUD berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa 3 kegiatan evaluasi kinerja pada BLUD RSUD.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah.

Dari hasil pengawasan atas 3 kegiatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

No	Area of Improvement	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kejadian
1	Ketersediaan tenaga medis belum sesuai kebutuhan	3	3
2	Jam pelayanan dokter spesialis belum sesuai dengan ketentuan	3	3
3	Jumlah SDM tidak sesuai dengan analisa jabatan	3	3
4	RBA belum dikaitkan dengan pencapaian target SPM	3	2
5	Rendahnya alokasi belanja modal yang bersumber dari pendapatan BLUD	3	3
6	SPI dan Dewan Pengawas belum berperan dalam manajemen risiko	3	3
7	Identifikasi risiko <i>fraud</i> belum dilakukan	3	3

Atas hal-hal yang memerlukan perbaikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada BLUD sehingga dapat berkinerja sehat.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya pembinaan dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun laporan keuangan serta peran pendamping desa dan dinas terkait dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa yang belum mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri.

3.3 JUMLAH BUMDES YANG MAMPU MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan pada tahun pelaporan.

Pada tahun 2022, jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan sebanyak 52 BUMDes atau mencapai 136,84% dari target, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah BUMDes yang Menyusun Laporan Keuangan
1.	Kotabaru	4
2.	Banjar	27
3.	Barito Kuala	6
4.	Tapin	6
5.	Hulu Sungai Selatan	1
6.	Hulu Sungai Tengah	3
7.	Hulu Sungai Utara	4
8.	Balangan	1

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 5 BUMDes.

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 53 BUMDes, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 99,11%.

Realisasi kinerja dari realisasi sebanyak 52 BUMDes berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa Bimbingan Teknis dan Evaluasi pada BUMDes.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya pembinaan dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun laporan keuangan, serta peran pendamping desa dan dinas terkait dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kedepannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa yang belum mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri.

3.4 JUMLAH BUMDES YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI PADA PEREKONOMIAN DESA

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa melalui Pendapatan Asli Desa.

Pada tahun 2022, jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak 3 BUMDes atau mencapai 100% dari target dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten	Nama BUMDes
1.	Tanah Laut	BUM Desa Tri Tunggal Mandiri Martadah Baru
2.	Tanah Laut	BUM Desa Berkah Mulia Bukit Mulia
3.	Tanah Laut	BUM Desa Miitra Rumpun Pandan Sari

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 0 BUMDes, maka realisasi IKK tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja dari realisasi sebanyak 3 BUMDes berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa kegiatan Evaluasi pada BUMDes.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah pemilihan jenis usaha BUMDesa yang sesuai dengan potensi desa dan dukungan dari pemerintah desa berupa penyertaan modal kepada BUMDesa.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berupaya memaksimalkan anggaran pengawasan yang tersedia secara efektif dan efisien sehingga diharapkan pada tahun 2023 mampu menghasilkan jumlah output yang lebih besar daripada tahun 2022.

PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha. memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 4 SHP atau sebanyak 200% dari target 2 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp99.725.674,00 atau 99,58% dari anggaran Rp100.147.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 1.303 OH atau 77,84% dari rencana sebanyak 1674 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 3 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 200% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,58%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 3 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 200% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 77,84%.



SASARAN KEGIATAN 4

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi menunjukkan sebanyak tiga indikator kinerja (75%) telah tercapai dan satu indikator tidak tercapai sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Capaian IKK Sasaran Kegiatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Notifikasi
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100.00	✓
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	80	100	125.00	✓
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	2	1	50.00	✗
4.4	Jumlah Pemda menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	1	100.00	✓

4.1 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN REPRESIF YANG DIMANFAATKAN/DITINDAKLANJUTI

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di hadapan penyidik dan di persidangan pada tahun 2022 atas Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN).

Pada tahun 2022, realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan atau ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 100%, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 100%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. PKA Dihadapan Penyidik

Terdapat 17 Pemberian Keterangan Ahli dihadapan Penyidik atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Belanja Desa (APBDes), perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Dana Hibah, perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Pengelolaan Dana Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana Desa, dll.

2. PKA di Persidangan

Terdapat 18 Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Belanja Desa (APBDes), perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Bangunan Puskesmas, perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Pemberian Kredit Investasi Refinancing, perkara dugaan tindak pidana korupsi Sisa Dana Hibah, dll.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kepercayaan mitra terhadap hasil audit BPKP dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pemberian keterangan ahli.

Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja di tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan kompetensi pegawai guna menjaga kualitas audit dan meningkatkan kepercayaan mitra kerja.



4.2 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PREVENTIF DAN EDUKATIF YANG DIMANFAATKAN /DITINDAKLANJUTI

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah/OPD/badan usaha yang mengimplementasikan *Fraud Control Plan* (FCP), Profiling Risiko Fraud, dan Pembelajaran Anti Korupsi, dengan jumlah pemerintah daerah/OPD/badan usaha yang dilakukan pembinaan FCP, Profiling Risiko Fraud, dan Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi pada tahun berjalan.

Pada tahun 2022, realisasi Persentase Hasil Pengawasan Preventif Dan Edukatif Yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target sebesar 80%.

Realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 90%, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 125%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan* (FCP)

Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan* bertujuan untuk mencegah, memudahkan pendeteksian, dan pengungkapan kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan dengan implementasi beberapa atribut dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dari kegiatan bimbingan teknis FCP yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian *diagnostic* eksistensi kebijakan antikecurangan dengan implementasi cukup memadai. Namun, penilaian risiko masih belum dilaksanakan.

Atas hal-hal yang perlu perbaikan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan tiga rekomendasi.

2. Identifikasi dalam Rangka Penyusunan Profil Risiko *Fraud*

Identifikasi dalam Rangka Penyusunan Profil Risiko *Fraud* dilakukan pada kegiatan berikut:

- a. Pemulihan Ekonomi melalui Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi dengan Penerapan *Online Single Submission* (OSS).

- b. Pemulihan Ekonomi melalui Perbaikan Neraca Perdagangan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- c. Pembangunan Jembatan Alalak.
- d. Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).
- e. Reformasi Pembangunan SDM melalui Reformasi Sistem Kesehatan Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes.

Hasil identifikasi risiko *fraud* adalah ditemukan beberapa titik kritis yang berisiko *fraud*.

3. Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi

Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi dilakukan di Kota Banjarmasin dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para pimpinan dan pegawai pada OPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin mengenai korupsi, penyebab, dan strategi dalam pemberantasan korupsi, serta Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi menghasilkan kesepakatan pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK).

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kepercayaan mitra kerja terhadap rekomendasi BPKP guna mendukung pencegahan dan pengendalian kecurangan (*fraud*) di lingkungan kerjanya

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan mengembangkan dan memperluas wawasan pegawai bidang Investigasi sehingga mampu membantu mitra kerja guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

4.3 JUMLAH PEMDA DENGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI BAIK

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki efektivitas pengendalian korupsi baik.

Pada tahun 2022, realisasi Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik adalah sebanyak satu pemda dari target sebanyak dua pemda.

Realisasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak satu pemda dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak empat pemda, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 50%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Assessment Status Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022
2. Sosialisasi dan *Diagnostic Assessment Fraud Control Plan* (FCP) pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tapin.
3. Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan* (FCP) pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kegiatan tersebut menghasilkan nilai efektivitas pengendalian korupsi pada Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 3,040 atau bernilai baik.

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah kekurangan sumber daya pada pemerintah daerah yang dilakukan pendampingan serta terdapat revisi perjanjian kinerja di akhir tahun anggaran yang memunculkan target kinerja “jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki efektivitas pengendalian korupsi baik”.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan memperluas Sosialisasi, *Diagnostic Assessment*, dan Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan*, serta *Assessment* Status IEPK ke Pemerintah Daerah yang memiliki nilai Efektivitas Pengendalian Korupsi di bawah 3,00.

4.4 JUMLAH PEMDA MENINDAKLANJUTI AREA OF IMPROVEMENT DARI HASIL PENGUKURAN EPK

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti *Area of Improvement* dari hasil pengukuran EPK.

Pada tahun 2022, realisasi Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik adalah sebanyak satu pemda dari target sebanyak satu pemda.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah melaksanakan aktivitas pengawasan penting untuk memastikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menindaklanjuti *Area Of Improvement* dari pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK).

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kepercayaan mitra kerja terhadap rekomendasi BPKP.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan memperluas lokus *Assessment* Status IEPK di Provinsi Kalimantan Selatan.

PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran Sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 28 SHP atau sebanyak 140% dari target 20 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp1.229.981.553,00 atau 99,88% dari anggaran Rp1.231.495.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 9356 OH atau 94,60% dari rencana sebanyak 9890 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 4 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 140% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,88%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 4 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 140% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 94,60%.

SASARAN KEGIATAN 5

MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS KUALITAS PENGENDALIAN INTERN K/L/P/BU

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional menunjukkan sebanyak tujuh indikator kinerja (70%) telah tercapai targetnya dan tiga indikator tidak tercapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Notifikasi
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100.00	✓
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	7	6	85.71	✗
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100.00	✓
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	12	12	100.00	✓
5.5	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $>$ Level 3	Kab/Kota	3	1	33.33	✗
5.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Jumlah	4	3	75.00	✗
5.7	Jumlah desa yang yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	20	100.00	✓
5.8	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20	29	145.00	✓
5.9	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMN	1	1	100.00	✓
5.10	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	2	2	100.00	✓

Uraian tiga indikator kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU sebagai berikut:

5.1 JUMLAH APIP PROVINSI DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah provinsi dengan kapabilitas APIP \geq level 3 (*delivered*) pada tahun pelaporan berdasarkan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri.

Realisasi tahun 2022, jumlah provinsi dengan kapabilitas APIP level 3 sebanyak 1 APIP, yaitu Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan atau mencapai 100% dari target.

Indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024 sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator yang digunakan merupakan gabungan dari indikator 5.1 dan indikator 5.2.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja, antara lain mendorong APIP untuk melaksanakan penilaian mandiri secara periodik dan menjalin komunikasi serta koordinasi yang lebih erat dengan pimpinan APIP dan pejabat fungsional auditor.

5.2 JUMLAH APIP KABUPATEN/KOTA DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP \geq level 3 (*delivered*) pada tahun pelaporan berdasarkan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri.

Realisasi tahun 2022, jumlah APIP dengan kapabilitas APIP \geq level 3 (*delivered*) sebanyak 6 APIP atau mencapai 85,71% dari target 7 APIP, yaitu Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Inspektorat Kabupaten Balangan, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, Inspektorat Kabupaten Banjar, Inspektorat Kota Banjarmasin, dan Inspektorat Kota Banjarbaru.

Sebagaimana telah dijelaskan pada indikator 5.1, indikator ini berbeda dengan indikator pada Renstra 2020-2024. Renstra 2020-2024 tidak merinci ke dalam

provinsi dan kabupaten/kota sehingga untuk membandingkan capaiannya dengan capaian tahun lalu, indikator 5.1 dan 5.2 akan digabung.

Jumlah Pemda dengan kapabilitas APIP \geq level 3 mengalami kenaikan dari tahun 2021, yaitu dari 6 APIP menjadi 7 APIP, dan telah mencapai 53,84% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 13 APIP.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini sebagai berikut:

- a. Melakukan diseminasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- b. Mendorong APIP melaksanakan penilaian mandiri dengan memberikan atensi kepada Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota perihal pelaksanaan penilaian mandiri kapabilitas APIP.
- c. Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP.
- d. Bimbingan teknis penyusunan PPBR dan audit kinerja berbasis risiko.
- e. Melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 bagi APIP yang menuju level 3, dan sesuai Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.11/S-686/D3/04/2022 bagi APIP yang telah berada di level 3.
- f. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan APIP maupun pejabat fungsional auditor melalui aplikasi whatsapp group.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Rencana aksi Pimpinan Daerah terkait dengan peningkatan Kapabilitas APIP dan implementasi manajemen risiko.
- b. Keterikatan pimpinan APIP dengan upaya peningkatan Kapabilitas APIP.
- c. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bidang pengawasan dalam mengoptimalkan penggunaan/pengalokasian sumber daya APIP secara ekonomis, efisien, dan efektif ke area pengawasan yang strategis, prioritas, dan berisiko tinggi dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan kinerja ke depan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan:

1. Memotivasi dan menumbuhkan kesadaran jajaran APIP tentang pentingnya meningkatkan kapabilitas APIP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mendampingi APIP dalam membuat *road map* kegiatan tahun 2023, khususnya perihal peningkatan kualitas kapabilitas APIP.
3. Melakukan pembinaan dan bimbingan yang berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan forum eksekutif kepala daerah secara formal dan informal ketika pertemuan tingkat pimpinan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya kapabilitas APIP dan penerapan WBS.
5. Bersinergi dengan bidang lain dalam peningkatan kompetensi SDM APIP untuk menyusun dan mengevaluasi *risk register* OPD.

5.3 JUMLAH PROVINSI DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah Provinsi yang berhasil memenuhi aspek dalam maturitas SPIP \geq Level 3 (Terdefinisi), yaitu organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik.

Realisasi jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 adalah 1 atau mencapai 100% dari target.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, antara lain sosialisasi dan bimtek Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SKPD di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kegiatan sosialisasi pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja antara lain mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan penilaian mandiri secara periodik, dan menjalin

komunikasi serta koordinasi yang lebih erat dengan pihak manajemen pemerintah daerah.

5.4 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun pelaporan.

Realisasi tahun 2022 adalah telah terdapat 12 Pemerintah Kabupaten/Kota atau mencapai 100% dari target yang mencapai maturitas SPIP \geq Level 3, dengan rincian pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Rincian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

No	Pemerintah Daerah	Skor SPIP
1.	Kabupaten Balangan	3.040
2.	Kabupaten Banjar	3.069
3.	Kabupaten Barito Kuala	3.213
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.320
5.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.031
6.	Kabupaten Kotabaru	3.066
7.	Kabupaten Tabalong	3.079
8.	Kabupaten Tanah Bumbu	3.213
9.	Kabupaten Tanah Laut	3.338
10	Kabupaten Tapin	3.067
11	Kota Banjarbaru	3.007
12	Kota Banjarmasin	3.082

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, berada pada jumlah yang sama, yaitu 12 Kabupaten/Kota yang mencapai maturitas SPIP \geq Level 3. Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 94,13%, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 98,06%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini sebagai berikut:

- a. Pendampingan persiapan, penilaian mandiri, serta penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Evaluasi dan *Quick Assessment* Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022.

Terdapat area yang memerlukan perbaikan (*area of improvement*) yang belum ditindaklanjuti dari penilaian Baseline Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021, antara lain kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran, kebijakan pengendalian korupsi dan kerangka formal manajemen risiko, dan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah terkait pengamanan aset.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan pemerintah daerah untuk menerapkan SPIP terintegrasi pada daerahnya masing-masing.
- b. Sebagian pemerintah daerah telah menjadikan SPIP sebagai target kinerja.
- c. Kompetensi pegawai BPKP yang menangani SPIP terintegrasi telah mencukupi secara kualitas dan kuantitas.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan:

- a. Mengajak pemerintah daerah untuk melakukan penilaian mandiri SPIP lebih awal.
- b. Mendampingi proses persiapan, penilaian mandiri, dan penjaminan kualitas pada seluruh pemerintah daerah, terutama pada kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan SPIP pada Level 2.

5.5 JUMLAH PEMDA KAB/KOTA DENGAN MRI > LEVEL 3

Indikator Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan jumlah Kabupaten/Kota yang berhasil memenuhi aspek dalam MRI \geq Level 3 (terdefinisi). Target kinerja ini pada Tahun 2022 adalah 3 Kabupaten/Kota.

Realisasi jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Maturitas MRI \geq Level 3 adalah 1 Kabupaten atau mencapai 33.33% dari target untuk Kabupaten/Kota. Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1 Kabupaten/Kota.

Tabel 3.7 Rincian Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

No	Pemerintah Daerah	Skor MRI 2022
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	2.725
2.	Kabupaten Balangan	2.985
3.	Kabupaten Banjar	2.992
4.	Kabupaten Barito Kuala	2.861
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.160
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2.734
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	2.713
8.	Kabupaten Kotabaru	2.859
9.	Kabupaten Tabalong	2.885
10.	Kabupaten Tanah Bumbu	2.937
11.	Kabupaten Tanah Laut	2.928
12.	Kabupaten Tapin	2.800
13.	Kota Banjarbaru	2.960
14.	Kota Banjarmasin	2.950

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 7 Kabupaten/Kota, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 14,29%.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan *Quick Assessment* penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022. Dari hasil evaluasi, hanya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memperoleh level 3 dengan nilai MRI sebesar 3,160.
- b. Pendampingan manajemen risiko pada Kabupaten/Kota (Banjarmasin, Tanah Laut, dan Hulu Sungai Tengah) yang menghasilkan daftar risiko operasional dan strategis OPD serta risiko strategis pemerintah daerah.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan dan mengimplementasikan manajemen risiko.
- b. Sumber daya pemerintah daerah belum memahami proses manajemen risiko.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan:

- a. Mendampingi proses penyusunan kebijakan manajemen risiko pemerintah daerah.

- b. Mendampingi proses pelaksanaan manajemen risiko pemerintah daerah.

5.6 JUMLAH PEMDA YANG AKUNTABEL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA DAERAH

Indikator ini diukur dengan jumlah pemerintah daerah yang berhasil memenuhi kriteria akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, antara lain opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 WTP dan nilai SAKIP tahun 2022 minimal BB.

Realisasi jumlah pemerintah daerah yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah adalah 3 atau mencapai 75% dari target. Realisasi indikator ini sama dengan tahun 2021. Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja pada tahun 2021.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan teknis pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
- b. Penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas opini LKPD.
- c. Pendampingan/asistensi dalam rangka penyusunan LKPD.
- d. FGD *troubleshooting* FMIS, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA BMD.

Faktor penghambat capaian kinerja adalah kualitas perencanaan pemerintah daerah yang kurang baik sehingga nilai SAKIP rendah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan:

- a. Mendampingi proses penyusunan LKPD dan *troubleshooting* aplikasi pendukungnya.
- b. Melakukan evaluasi perencanaan dan pendampingan optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

5.7 JUMLAH DESA YANG PENGELOLAAN KEUANGANNYA AKUNTABEL

Indikator ini diukur dengan jumlah desa yang berhasil memenuhi kriteria akuntabel dalam pengelolaan keuangan, yaitu telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Target kinerja pada Tahun 2022 adalah 20 desa.

Realisasi jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel adalah 20 desa atau mencapai 100% dari target. Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada revisi perjanjian kinerja pada akhir triwulan III tahun 2022.

Tabel 3.8 Rincian Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1.	Kabupaten Tabalong	5
2.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	5
3.	Kabupaten Tanah Laut	5
4.	Kabupaten Barito Kuala	5

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa.
- b. Bimbingan Teknis aplikasi Siskeudes dan pengelolaan aset desa.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sinergitas yang baik antara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, pihak Inspektorat Kabupaten/Kota juga senantiasa melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan keuangan desa.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kompetensi auditor demi menjaga kualitas pengawasan, baik itu *consulting* maupun *assurance* selain tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah.

5.8 JUMLAH DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET DESA SECARA MEMADAI

Indikator ini diukur dengan jumlah desa yang berhasil memenuhi kriteria pengelolaan aset desa secara memadai, yaitu desa sudah melakukan inventarisasi aset desa pada tahun pelaporan.

Realisasi jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai adalah 29 desa atau mencapai 145% dari target. Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 21 desa atau 262,5%. Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target periode Renstra Tahun 2020-2024 karena merupakan IKK yang baru ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja pada tahun 2021.

Tabel 3.9 Rincian Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1.	Kabupaten Tanah Laut	8
2.	Kabupaten Tapin	8
3.	Kabupaten Tabalong	8
4.	Kabupaten Barito Kuala	5

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

- Monitoring Tata Kelola, Akuntabilitas Keuangan, dan Aset Desa.
- Monitoring dan Evaluasi atas Governansi Aset Desa.
- Bimbingan Teknis aplikasi Siskeudes dan pengelolaan aset desa.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sinergitas yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, pihak Inspektorat Kabupaten/Kota juga senantiasa melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan keuangan desa.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kompetensi auditor demi menjaga kualitas pengawasan, baik itu *consulting* maupun

assurance, selain tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah.

5.9 JUMLAH BUMD DENGAN MRI \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah BUMD yang berhasil memenuhi aspek dalam MRI \geq Level 3 (terdefinisi).

Pada tahun 2022, jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 1 BUMD atau mencapai 100% dari target, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BLUD	Skor	Predikat
1.	PT Air Minum Bandarmasih	3,36	Terdefinisi

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 3 BUMD, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 33,33%.

Realisasi kinerja terdiri dari realisasi sebanyak 1 BUMD berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa kegiatan Desk Reviu Tingkat Maturitas Manajemen Risiko.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah dengan melaksanakan Desk Reviu Tingkat Maturitas Manajemen Risiko pada PT Air Minum Bandarmasih.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah kompetensi auditor SPI yang telah memadai dan dukungan dari manajemen terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis kepada BUMD yang belum menerapkan manajemen risiko terkait pentingnya manajemen risiko untuk mendukung tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan keuntungan dan menjamin keberlangsungan usaha.

5.10 JUMLAH BLUD DENGAN MRI \geq LEVEL 3

Indikator ini diukur dengan jumlah BLUD yang berhasil memenuhi aspek dalam MRI \geq Level 3 (terdefinisi).

Pada tahun 2022, jumlah BLUD dengan dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 2 BLUD atau mencapai 100% dari target dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BLUD	Skor	Predikat
1.	RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar	3,21	Terdefinisi
2.	RSUD H. Boejasin Kabupaten Tanah Laut	3,02	Terdefinisi

Apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 4 BLUD, maka realisasi IKK tahun 2022 mencapai 50%.

Realisasi kinerja dari realisasi sebanyak 2 BLUD berasal dari kegiatan pengawasan oleh Bidang Akuntan Negara berupa kegiatan evaluasi tingkat maturitas Manajemen Risiko Rumah Sakit.

Aktivitas-aktivitas penting yang mendukung pencapaian target indikator ini adalah melakukan kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis implementasi manajemen risiko.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk tim pengawasan dan perencanaan BLUD telah memadai.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ke depan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan kompetensi pegawai untuk menjaga kualitas audit dan meningkatkan kepercayaan mitra kerja.

PENGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 5 SHP atau sebanyak 166,67% dari target 3 SHP. Dukungan realisasi dana sebesar Rp340.735.002,00 atau 99,77% dari anggaran Rp341.523.000,00, dan penggunaan SDM sebanyak 1117 OH atau 92,45% dari rencana sebanyak 1208 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 5 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 166,67% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 99,77%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 5 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 166,67% lebih besar dari capaian penggunaan SDM sebesar 92,45%.

SASARAN KEGIATAN 6

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN “KETATAUSAHAAN” UNIT KERJA

Pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Kualitas Pelayanan “Ketatausahaan” Unit Kerja menunjukkan sebanyak tujuh indikator kinerja (100%) telah tercapai targetnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10.



Tabel 3.10 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan “Ketatausahaan” Unit Kerja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Notifikasi
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	84.60	112.80%	✓
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	87.75	107.01%	✓
6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	% (Persen)	70	77.19	110.27%	✓
6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	% (Persen)	100	100	100,00%	✓
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	92.25	126.74%	✓
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	96.33	101.40%	✓
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 110	80	104.72	143.99%	✓

Rincian pencapaian kinerja sasaran program beserta realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam lampiran I.

6.1 NILAI SKOR ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA

Indikator “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

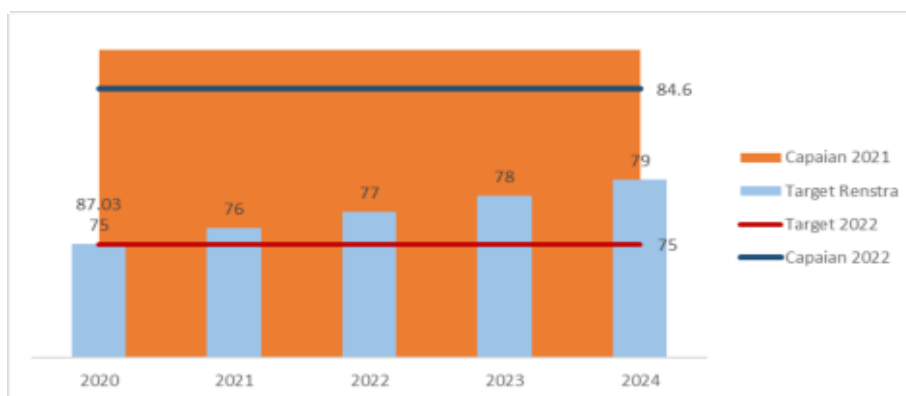
Realisasi nilai skor zona integritas unit kerja tahun 2022 adalah 84,60 atau mencapai 112,80% dari target sebesar 75 dari skor skala 100, dengan rincian pada table 3.11:

Tabel 3.11 Ringkasan nilai skor zona integritas unit kerja

No.	Uraian	Skor		
		Pengungkit	Reform	Hasil
1	Manajemen Perubahan	3.09	3.67	-
2	Penataan Tatalaksana	2.72	2.33	-
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	4.00	4.25	-
4	Penguatan Akuntabilitas	4.73	4.31	-
5	Penguatan Pengawasan	4.99	6.88	-
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.65	4.18	-
7	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	-	-	20.16
8	Kualitas Layanan Publik	-	-	15.66
Jumlah		23.17	25.61	35.82
Total Skor				84.60

Perbandingan realisasi nilai skor zona integritas unit kerja tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik 3.1 berikut.

Grafik 3.1 Target dan realisasi nilai skor zona integritas unit kerja



Nilai skor Zona Integritas unit kerja mengalami penurunan dari tahun 2021 dan telah mencapai 107,09% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Adanya keteladanan pimpinan dan iklim kerja yang memungkinkan penerapan integritas oleh pegawai.
- Adanya pengembangan kompetensi SDM secara terus menerus.
- Penerapan sistem kendali mutu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Rencana Tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja, antara lain:

- Penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkelanjutan atau pelaksanaannya; dan
- Pengembangan kompetensi pegawai, terutama di lingkungan Bagian Umum.

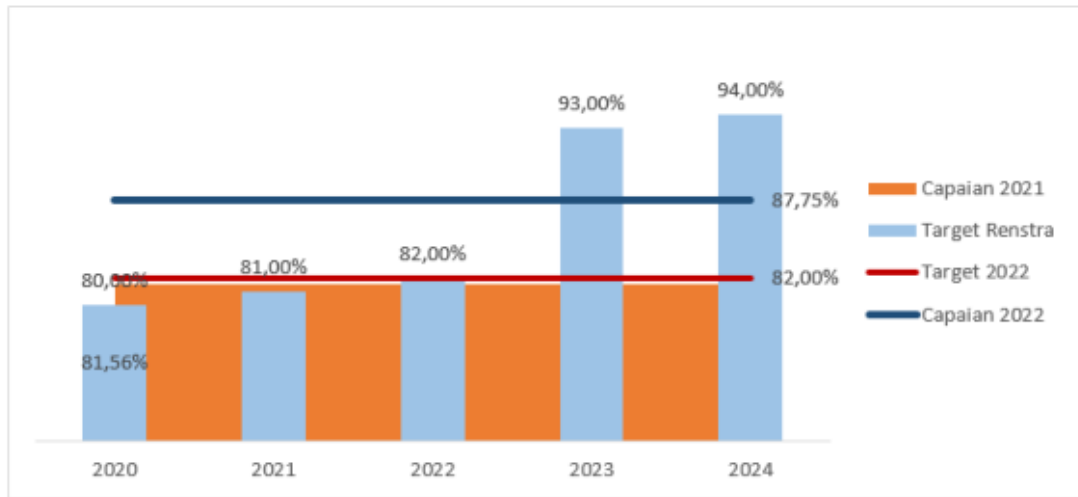
6.2 NILAI SAKIP UNIT KERJA

Indikator ini diukur berdasarkan hasil *quality assurance* implementasi SAKIP oleh Tim Inspektorat BPKP.

Realisasi nilai SAKIP adalah sebesar 87,75 atau mencapai 107,01% dari target nilai 82. Perbandingan realisasi nilai Implementasi SAKIP tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.2 Target dan realisasi nilai SAKIP





Pada Grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai SAKIP mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dan telah mencapai 93,35% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja antara lain terdapat ukuran kinerja koordinator pengawasan bidang atau pejabat struktural eselon III dan eselon IV sebagai turunan kinerja atasannya dan terdapat pemantauan mengenai pencapaian kinerja.

Rencana tindak untuk mempertahankan kinerja adalah dengan meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan atas rencana aksi.

6.3 PERSENTASE EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN UNIT KERJA (SPIP UNIT KERJA)

Indikator ini diukur dengan penurunan dampak dan frekuensi (level risiko) atas risiko yang teridentifikasi. Realisasi tahun 2022 sebesar 77,19% atau mencapai 90,68% dari target sebesar 70%, dengan rincian pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Realisasi penurunan dampak dan frekuensi risiko yang teridentifikasi

No	Uraian	Jumlah
1	Risiko teridentifikasi dan dimitigasi	57
2	Jumlah risiko yang menurun level risiko setelah dilakukan pengendalian intern	44

Indikator ini merupakan inovasi di tahun 2021 sehingga tidak tercantum pada Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun lalu ataupun dengan target 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah pemilik resiko telah melaksanakan tindak pengendalian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja antara lain melaksanakan identifikasi risiko dengan cermat, melakukan analisis penyebab resiko, menyusun rencana tindak pengendalian, dan melaksanakan tindak pengendalian.

6.4 PERSENTASE PENYELESAIAN RTP (MRI UNIT KERJA)

Indikator ini diukur dengan realisasi tindak pengendalian dibandingkan daftar rencana tindak yang telah disusun. Realisasi tahun 2022 telah dilaksanakan 12 tindak pengendalian dari 12 yang ditetapkan sebagai tindak pengendalian atau 100%, dengan rincian pada tabel 3.13.

Tabel 3.13 Realisasi tindak pengendalian dari rencana tindak yang telah disusun

No	Uraian	Jumlah
1	Risiko teridentifikasi	44
2	Penyebab teridentifikasi	44
3	Rencana Tindak Pengendalian	12
4	Realisasi Tindak Pengendalian	12

Indikator ini merupakan inovasi di tahun 2022 sehingga tidak tercantum pada Renstra 2020-2024 dan tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun lalu ataupun dengan target 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain adanya komitmen dari seluruh pemilik resiko untuk melaksanakan tindak pengendalian yang telah direncanakan dan adanya pemantauan oleh pimpinan.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja, antara lain dengan melakukan identifikasi dan mitigasi risiko sesuai dengan tugas yang akan

dilaksanakan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menyusun rencana tindak pengendalian serta melakukan monitoring pelaksanaannya.

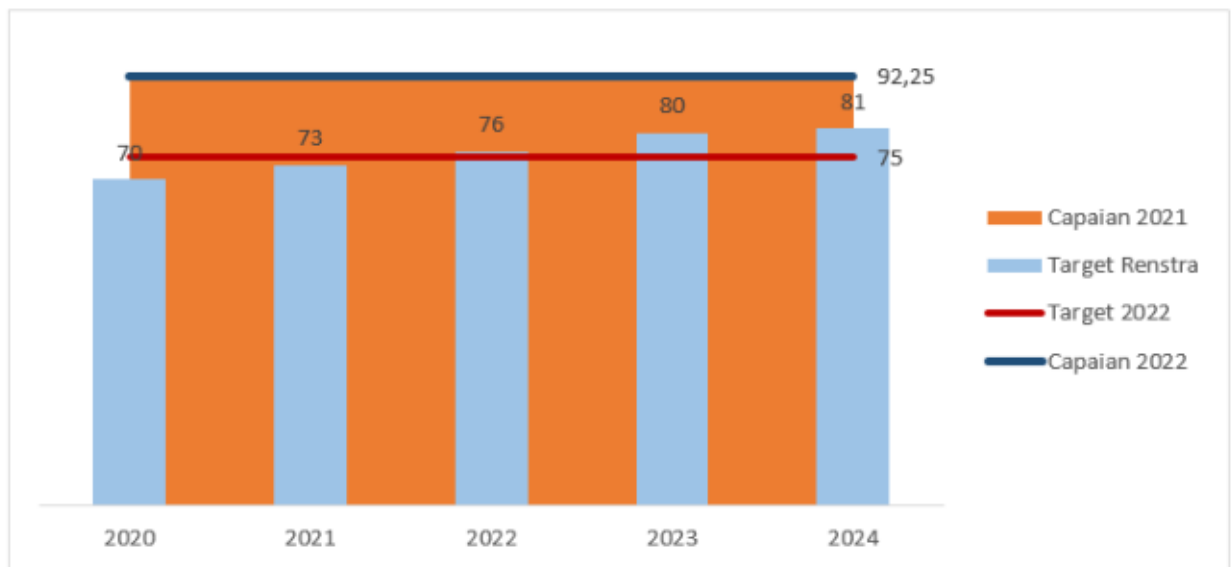
6.5 INDEKS KUALITAS LAYANAN EKSTERNAL UNIT KERJA

Indikator ini diukur berdasarkan survei yang dilakukan kepada mitra kerja yang menerima layanan tahun 2022. Periode yang disurvei adalah atas layanan yang diberikan selama bulan Januari s.d. Desember tahun 2022.

Hasil survei menunjukkan nilai kepuasan sebesar 92,25 atau mencapai 123% dari target sebanyak 75,00.

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan tahun 2022 dengan target tahun 2020 - 2024 pada Grafik berikut.

Grafik 3.3 Target dan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Eksternal



Dari Grafik di atas, Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja Perwakilan mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan telah mencapai 113,88% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain kualitas layanan yang diberikan telah memenuhi harapan mitra kerja dan kompetensi SDM yang melaksanakan tugas pengawasan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Rencana tindak peningkatan capaian kinerja, antara lain melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua fokus penilaian secara berkala dan mendokumentasikan dalam rangka perbaikan yang berkelanjutan, serta melakukan perbaikan berupa pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan secara otomatis dan *online*.

6.6 SKOR IKPA UNIT KERJA

Indikator ini diukur berdasarkan hasil penilaian dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan pada tahun pelaporan.

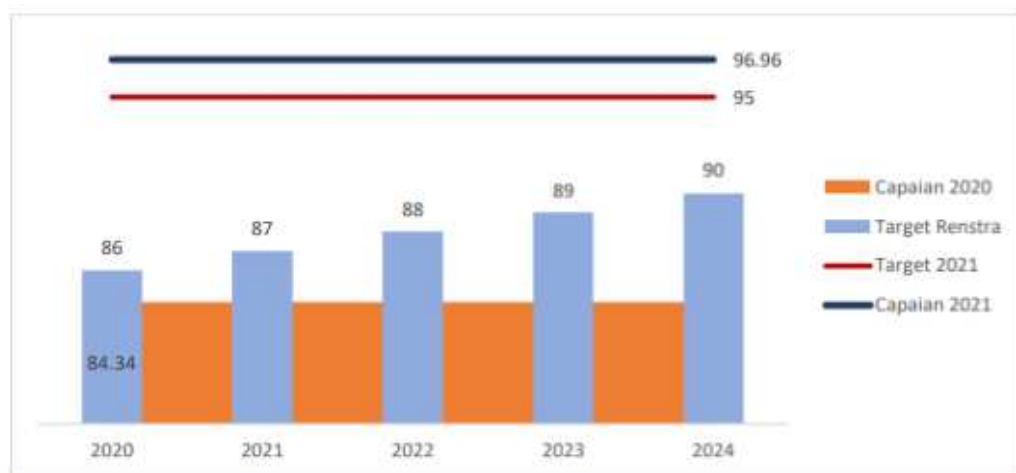
Realisasi Skor IKPA adalah sebesar 96,20 orang atau mencapai 101,26% dari target 95, dengan rincian pada Tabel berikut.

Tabel 3.14 Realisasi skor IKPA unit kerja

NO	ASPEK	SKOR
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	94.81
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.77
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100
Skor Akhir		96.20

Perbandingan Skor IKPA tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Grafik 3.4 Target dan realisasi Skor IKPA Unit Kerja



Dari Grafik 3.16, Skor IKPA mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan telah mencapai 107,73% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain dikarenakan koordinator perencanaan telah memberikan target waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan revisi anggaran, bendahara telah secara tertib dalam melakukan penatausahaan keuangan, dan adanya dukungan pertanggungjawaban keuangan dari pelaksana kegiatan yang sesuai dan tepat waktu.

Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan kinerja dengan merumuskan proyeksi penarikan dana bulanan secara lebih cermat dan melaksanakan pelaporan output atas realisasi kegiatan secara lebih tertib.

6.7 NILAI PENGELOLAAN BMN UNIT KERJA

Indikator ini diukur berdasarkan Penilaian Mandiri (unit kerja) yang telah divalidasi oleh Biro Umum BPKP.

Realisasi tahun 2022 sebesar 104,72 atau mencapai 143,99% dari target 80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi nilai pengelolaan BMN Unit Kerja

INDIKATOR PENILAIAN	REALISASI
Perencanaan kebutuhan belanja modal Tahun 2023 dan 2024 tepat waktu	100
Penyampaian laporan bulanan belanja modal tepat waktu	100
Penyampaian laporan triwulan penggunaan kandungan dalam negeri tepat waktu	59
Terdapat korelasi antara perencanaan BMN dalam RKA dengan RKBMN	100
Penyusunan rencana pengadaan dalam Aplikasi SIRUP	100
Penyusunan rencana pengadaan dalam SIRUP dilakukan tepat waktu	100
Update atas perubahan yang terjadi di dalam pengadaan dalam Aplikasi SIRUP	100
Rencana pengadaan barang dan jasa di upload pada website unit kerja	100
Penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang dengan perolehan barang sampai dengan tahun 2021	100
Penetapan status penggunaan dari Pengguna Barang dengan perolehan barang sampai dengan tahun 2021	100
Tersedianya catatan atau bukti penyerahan atas penggunaan barang-barang yang dimanfaatkan oleh pegawai	100

INDIKATOR PENILAIAN	REALISASI
Pemutakhiran masa berlaku dan tarif pada SIP Rumah Negara	100
Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga telah dilakukan perhitungan dan perjanjian	100
Tarif pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku	100
Penyetoran PNPB oleh pihak ketiga dilakukan tepat waktu	100
Pelaksanaan inventarisasi dan update DBR secara berkala	100
Sertifikasi seluruh bidang tanah sesuai ketentuan	100
Pemberian sticker pengamanan BMN	100
Rencana pemeliharaan BMN disampaikan tepat waktu	100
Pengusulan SK Panitia Penghapusan unit kerja kepada Pengguna Barang	100
Terdapat BMN dengan kondisi rusak berat dan telah di reklasifikasi ke dalam aset yang tidak digunakan dalam operasional	100
Pemindahtanganan dan penghapusan BMN	100
Terdapat persediaan dalam kondisi kadaluarsa/usang	100
Perekaman transaksi persediaan tahun berjalan pada Aplikasi SAKTI	100
Tidak terdapat ketidaksesuaian akun akun dan kode pada barang persediaan	100
Pelaksanaan tutup buku SAKTI modul persediaan	100
Perekaman transaksi atas aset tahun berjalan pada Aplikasi SAKTI	100
Tidak terdapat ketidaksesuaian akun akun dan kode pada barang aset tetap/aset tak berwujud	100
Pelaksanaan tutup buku SAKTI modul aset tetap	100
Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna tahun 2021 tepat waktu	100
Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna semester I tahun 2022 tepat waktu	100
Peyusunan dan penyampaian Laporan Wasdal BMN tahun 2021 tepat waktu	100
Penyusunan dan penyampaian Laporan Wasal BMN Semester I tahun 2022 tepat waktu	100
Pelaksanaan sosialisasi terkait pengelolaan BMN	100

PENGUNAAN ANGGARAN DAN SDM

Sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja memiliki rincian output dengan realisasi sebanyak 2 layanan dan 15 unit atau sebanyak 100,00% dari target 2 layanan dan 15 unit. Dukungan realisasi dana sebesar Rp19.831.930.662,00 atau 98,56% dari anggaran Rp20.122.400.000,00, dan

penggunaan SDM sebanyak 7.584 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 7.584 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 6 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 100,00% lebih besar dari capaian penggunaan dana sebesar 98,56%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja Sasaran Kegiatan 6 telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output 100,00% sama dengan dari capaian penggunaan SDM sebesar 100,00%.

C. KINERJA LAINNYA

Selain kinerja pengawasan dan dukungan pengawasan yang diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan kinerja lainnya, yang ditunjukkan dengan adanya:

1. Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Atas inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan anggaran, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapat Piagam Penghargaan Terbaik II Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 untuk Kategori Kementerian/Lembaga yang Mempunyai Satker 1.

2. Dukungan Pengendalian Inflasi pada Kabupaten Tabalong



Atas inovasi ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapat Piagam Penghargaan dari Bupati Tabalong atas Dukungan, Kerjasama dan Pendampingan dalam Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Tabalong.

3. Piagam Penghargaan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2022



Atas inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapat Piagam Penghargaan Terbaik III pada

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sebesar Rp24.169.800.522 atau terserap 98,78% dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp24.469.194. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan mata anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	15.906.450.000	15.625.094.060	98.23%
2	Belanja Barang	7.597.244.000	7.580.753.162	99.78%
3	Belanja Modal	965.500.000	963.953.300	99.84%
	Jumlah	24.469.194.000	24.169.800.522	98.78%

Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 Menurut Program/ Kegiatan

No	Rincian Output (RO)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Dukungan Manajemen			
1	Layanan Perkantoran	18.663.190.000	18.374.267.322	98.45%
2	Layanan Umum	493.710.000	493.710.000	99.39%
3	Layanan Sarana Internal	420.000.000	418.929.300	99.75%
4	Layanan Prasarana Internal	545.500.000	545.024.000	99.91%
	Jumlah Program	20.122.400.000	19.828.940.497	98.54%
II	Program Pengawasan Pembangunan			
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	178.410.000	178.228.129	99.90%
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	2.261.248.000	2.258.875.407	99.90%
3	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	77.538.000	77.157.480	99.51%
4	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	28.245.000	28.190.160	99.81%
5	Hasil Koordinasi Perencanaan. Evaluasi. Pelaporan. dan Tindak Lanjut	15.459.000	15.375.600	99.46%
6	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	140.974.000	140.781.180	99.86%

7	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	73.445.000	73.036.464	99.44%
8	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	78.464.000	77.485.000	98.75%
9	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	1.153.031.000	1.152.49.553	99.95%
10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	313.278.000	312.544.842	99.77%
11	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	26.702.000	26.689.210	99.95%
	Jumlah Program	4.346.794.000	4.340.860.025	99.86%
	Total Anggaran dan Realisasi	24.469.194.000	24.169.800.522	98.78%



BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2022, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja terhadap proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dalam upaya peningkatan pencapaian sasaran organisasi di masa mendatang.

Secara umum, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan realisasi Indikator Kinerja yang mencapai atau melebihi target sebanyak 28 indikator dari 31 indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Kegiatan 1	IK 1 tercapai 447.375%
	IK 2 tercapai 216.06%
	IK 3 tercapai 92.663.32%
Sasaran Kegiatan 2	IK 1 tercapai 117.65%
	IK 2 tercapai 100.00%
	IK 3 tercapai 125.00%
Sasaran Kegiatan 3	IK 1 tercapai 109.09%
	IK 2 tercapai 150.00%
	IK 3 tercapai 136.84%
	IK 4 tercapai 1000.00%
Sasaran Kegiatan 4	IK 1 tercapai 100.00%
	IK 2 tercapai 125.00%
	IK 3 tercapai 50.00%
	IK 4 tercapai 100.00%
Sasaran Kegiatan 5	IK 1 tercapai 100.00%
	IK 2 tercapai 85.71%
	IK 3 tercapai 100.00%
	IK 4 tercapai 100.00%
	IK 5 tercapai 33.33%
	IK 6 tercapai 75.00%
	IK 7 tercapai 100.00%
	IK 8 tercapai 145.00%
	IK 9 tercapai 100.00%
	IK 10 tercapai 100.00%
Sasaran Kegiatan 6	IK 1 tercapai 112.80%
	IK 2 tercapai 107.01%
	IK 3 tercapai 142.86%
	IK 4 tercapai 100.00%
	IK 5 tercapai 123.00%
	IK 6 tercapai 101.40%
	IK 7 tercapai 118.83%

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target. Hal ini merupakan tugas ke depan dalam memperbaiki kinerja yang belum

tercapai dan sekaligus mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai.

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang terhadap Indikator Kinerja yang belum mencapai target, antara lain:

1. Mempertahankan faktor-faktor pendukung keberhasilan.
2. Memberikan atensi kepada Kepala Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kinerja APIP Daerah.
3. Menjaga kepercayaan mitra kerja.
4. Memberikan rekomendasi yang bersifat strategis.
5. Melakukan pendampingan penyusunan roadmap kegiatan pengawasan APIP, penyusunan laporan keuangan BUMDes, dan pengelolaan risiko mitra kerja.
6. Meningkatkan kualitas SDM.
7. Meningkatkan metode pengawasan yang lebih efektif.
8. Mengembangkan penilaian risiko atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.

KILAS PERISTIWA



4 JANUARI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke tempat pengelolaan sampah medis (Incenerator) di Desa Sungai Pitung Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala



5 JANUARI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap Meninjau Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin Untuk Melihat Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar.



10 JANUARI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap Melakukan Koordinasi Dengan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin.



10 JANUARI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Membuka Seminar Online AAIP Kalimantan Selatan Dengan Mengambil Topik "Continuous Control Monitoring Introduction".



14 JANUARI 2022

Penandatanganan Pakta Integritas Sebagai Bentuk Komitmen Untuk Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.



17 JANUARI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap Menerima Kunjungan Dari Ptt. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Husairi Abdi Beserta Jajarannya.



17 JANUARI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, bersama Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS membuka kegiatan Workshop atas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWAKEUDES) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).



22 JANUARI 2022

Vaksinasi Booster pada pegawai perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Puskesmas Sungai Ulin Kota Banjarbaru.



24 JANUARI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi narasumber dalam acara Focuss Group Discussion (FGD) Analisis Manajemen Risiko Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batangan.



25 FEBRUARI 2022

Cofee Talk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Library Café BPKP Kalsel.



3 MARET 2022

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan memberikan arahan pada acara LPelatihan Jurnalistik Pegawai BPKP Kalsel Bersama Warta Banjar.



15 MARET 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan membuka Forum Group Discussion Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.



15 MARET 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan silaturahmi dari Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina beserta jajaran pimpinan Pemerintah Kota Banjarmasin.



17 MARET 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama-sama dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri.



18 MARET 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan paparan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama-sama dengan KPK, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.



28 MARET 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan membuka "Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi se-Kalimantan" di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin.



30 MARET 2022

Coffee talk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Bersama anggota DPR RI, Muhammad Rizqinizamy Karsayuda.



31 MARET 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Kerjasama Antara Penyelenggara Pelabuhan Dengan Badan Usaha Pelabuhan Dalam Bentuk Konsesi sekaligus puncak kegiatan HUT ke 18 PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) di Ballroom Hotel Best Western Banjarmasin.



8 APRIL 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi rencana tindak dengan Pemerintah Kota Banjarmasin.



21 APRIL 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan komitmen P3DN bersama Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Tabalong.



28 APRIL 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Anggota Komite IV DPD RI menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa untuk mendorong agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel.



10 MEI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pegawai mengikuti Halal Bihalal secara virtual yang diselenggarakan oleh BPKP Pusat.



12 MEI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan komitmen P3DN bersama Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara.



13 MEI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Eben Nesor Silalahi.



17 MEI 2022

Kepala BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ketika menerima kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Banjar H. Muhammad Rofiqi, S.H.



19 MEI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan komitmen P3DN bersama Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Balangan.



24 MEI 2022

Kepala Perwakilan BPKP, Rudy M. Harahap mengajak semua Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD Air Minum se-Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen dalam penerapan Governance, Risk Management, and Control (GRC) korporasi.



25 MEI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Pengembangan Katalog Elektronik Lokal untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)" (24/5) di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.



25 MEI 2022

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan donor darah dalam rangka memperingati HUT BPKP Ke-39



25 MEI 2022

Kegiatan Bakti Sosial di Panti Asuhan yang dilaksanakan oleh DWP BPKP Kalsel dalam rangka peringatan HUT BPKP Ke -39.



25 MEI 2022

Kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT BPKP Ke -39.



30 MEI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu narasumber dalam Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala di Pyramide Suites Hotel Banjarmasin.



7 JUNI 2022

Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 yang bertempat di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.



13 JUNI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri pembukaan Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tipikor Pidana Korupsi Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.



14 JUNI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Instansi Vertikal di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Galaxy Hotel Kota Banjarmasin.



15 JUNI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi" yang diselenggarakan oleh KPK di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.



15 JUNI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi narasumber pada Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan” di Hotel Galaxy Banjarmasin.



21 JUNI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pembicara dalam Workshop Pengendalian Penyelenggaraan SPAM TA. 2022 Provinsi Kalimantan Selatan yang diadakan di Rattan Inn Hotel Banjarmasin.



21 JUNI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Pertemuan Tindakan lanjut Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.



30 JUNI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan komitmen P3DN bersama Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Tanah Laut.



4 JULI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Workshop Pendampingan Pembentukan BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di selenggarakan di Hotel Novotel Banjarbaru.



6 JULI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi pembekalan bagi kontraktor, konsultan, dan pegawai BPJN di Mercure Hotel, Banjarmasin.



13 JULI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan komitmen P3DN bersama Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



14 JULI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan sambutan dalam acara Asistensi Monitoring P3DN Daerah dan Penerapan Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi Level 3 Pemerintahan Kabupaten Balangan.



27 JULI 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri rapat entry meeting bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan para pihak terkait, di Aula Ruang Rapat Aberani Sulaiman Banjarbaru.



2 AGUSTUS 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik Penyesuaian Tarif PT Air Minum Bandarmasih di Kota Banjarmasin.



4 AGUSTUS 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri sosialisasi manajemen risiko dalam kepemimpinan dan peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai ASN di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diselenggarakan di Hotel Niraz Syariah Guest House, Banjarmasin.



5 AGUSTUS 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Bimbingan Teknis Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD Puskesmas yang bertempat di Hotel Novotel Banjarbaru.



8 AGUSTUS 2022

Aksi kolaborasi antara Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan diwujudkan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Daerah (RAKORWASINDA) tahun 2022 yang diselenggarakan di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin.



24 AGUSTUS 2022

Penandatanganan komitmen bersama kepala perwakilan bpkp kalsel dengan bupati kabupaten banjar untuk pelaksanaan percepatan P3DN.



6 SEPTEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan di Komplek Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru.



6 SEPTEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Hotel Galaxy Kota Banjarmasin..



19 SEPTEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri pencaangan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertempat di Pendopo Kantor Bupati Hulu Sungai Selatan.



28 SEPTEMBER 2022

Kepala perwakilan BPKP Kalsel, Anggota DPR RI dan Bupati kab. Banjar melaksanakan "Gowes Sehat" untuk melakukan pemantauan secara langsung terkait progres pembangunan infrastruktur di Martapura



7 OKTOBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rapat Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Galaxy Hotel Banjarmasin.



13 OKTOBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Kerja Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah di Kabupaten Barito Kuala.



14 OKTOBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja Anggota Komisi III DPRD dalam rangka konsultasi terkait Pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi ke PDAM.



17 OKTOBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel menghadiri Penutupan MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 di alun-alun Ratu Jalecha Martapura.



27 OKTOBER 2022

Jajaran Direksi Bank Kalsel sambangi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka konsultasi terkait tindak lanjut hasil evaluasi kualitas GRC dan kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah yang dilakukan oleh BPKP



2 NOVEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan menghadiri pembukaan acara Koordinasi dan Pelatihan Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.



2 NOVEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Bimbingan Teknik Yustisial Tenaga Teknis kepaniteraan pengadilan agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2022 yang diselenggarakan di aula Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.



7 NOVEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel menghadiri Rapat Koordinasi Tentang Manajemen Pengawasan Intern dan Pelaksanaan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Wilayah KPU Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Rattan In, Kota Banjarmasin.



9 NOVEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap menghadiri acara Shareholder Conference Bank Kalsel di Taman Siring KM 0, Banjarmasin.



9 NOVEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel menghadiri Rapat Koordinasi Tentang Manajemen Pengawasan Intern dan Pelaksanaan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Wilayah KPU Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Rattan In, Kota Banjarmasin.



10 NOVEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan membuka rapat verifikasi penilaian MCP dengan seluruh Inspektur dan tim verifikasi KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.



17 NOVEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Mahligai Sultan Adam, Martapura.



13 DESEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Talkshow Digitalisasi Sistem Keuangan Daerah di Hotel Grand Dafam Banjarbaru.



14 DESEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan arahan dalam Forum Grup Discussion (FGD) Upaya Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Melalui Peningkatan Produksi Tanaman Pangan yang diselenggarakan di Ruang Idham Cholid Kantor Bank Indonesia, Kota Banjarmasin.



19 DESEMBER 2022

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melantik secara resmi Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN) Nirwikoro di Ruang Barito Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target 2020 - 2024
- Lampiran 2 Target dan Realisasi Outcome
- Lampiran 3 Perbandingan Kinerja Outcome
- Lampiran 4 Target dan Realisasi Capaian Output
- Lampiran 5 Proyek Strategis Nasional
- Lampiran 6 Badan Usaha dengan Akuntabilitas Kinerja “Baik”
- Lampiran 7 Tingkat Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MRI dan Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemda Provinsi Serta Kab/Kota

SASARAN KEGIATAN. INDIKATOR KINERJA. DAN TARGET 2020 - 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi (jutaan rupiah)	300	750	1	1.5	2
	Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi (jutaan rupiah)	108	259	324	388	453
	Nilai potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)	500	1	1.5	2	2.4
	Nilai potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi (jutaan rupiah)	216	432	540	647	755
	Nilai efisiensi pengeluaran pemerintah daerah (jutaan rupiah)	-	185.428	152.978	134.621	111.062
	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah (jutaan rupiah)	1.123	1.351	1.509	1.649	1.868
	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah (jutaan rupiah)	27.124	40.679	49.715	56.5	51.982
	Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	-	118	120	122	125
	Nilai penyelamatan pembiayaan daerah	-	59	60	61	62
	Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional dan Daerah	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	0	2	0	0
Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi		7	7	7	7	7
Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target		7	7	7	7	7
Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target		0	1	1	1	1
Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik		0.00%	25.00%	31.25%	37.50%	50.00%
Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan		75%	80%	85%	85%	85%
Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik		0	0	0	1	3
Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0.00%	0.00%	0.00%	5.88%	17.65%
	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	10	10	11	11	12
	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	43.48 %	43.48%	47.83%	47.83%	52.17%
	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	2	2	2	2	2
	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%
	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	24	31	38	47	53

Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil Pengawasan refresif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	0	0	2	3	4
	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	0	0	0	1	2
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern pada Pemda dan Badan Usaha	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	6	8	10	12	13
	Persentase APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	42.86 %	57%	71%	86%	93%
	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	14	14	14	14	14
	Persentase Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	1	1
	Persentase Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	0%	0%	0%	100.00 %	100.00 %
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	1	3	4	5	7
	Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	7.69%	23.08%	30.77%	38.46%	53.85%
	Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	0.55%	1.48%	2.21%	2.58%	2.58%
	Jumlah rekomendasi strategis (policy brief) kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1
	Persentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa	40%	44.99%	50.03%	55.01%	60%
	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai	0	37	92	197	418
	Jumlah APIP yang mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes	1	3	4	6	6
	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	0	1
	Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00 %
	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	0	0	1	1	3
	Persentase BUMD dengan MRI \geq Level 3	0.00%	0.00%	5.88%	5.88%	17.65%
	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	0	0	2	3	4
	Persentase BLUD dengan MRI \geq Level 3	0.00%	0.00%	12.50%	18.75%	25.00%
	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0	0	0	1	3
Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0.00%	0.00%	0.00%	5.88%	17.63%	
Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0	0	0	0	1	

	Persentase BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00 %
Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Nilai Skor Zona Integritas	75	76	77	78	79
	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyusunan RKA tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran	86	87	88	89	90
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	90%	91%	92%	93%	95%
	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai pengelolaan BMN	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Nilai implementasi SAKIP	80	81	82	83	84
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	Indeks Manajemen Risiko	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	Indeks kepuasan layanan ketatausahaan	70	76	80	81	82
	Indeks kepuasan layanan Perwakilan BPKP	70	73	76	80	81

TARGET DAN REALISASI *OUTCOME*

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KINERJA TAHUN 2022				KEUANGAN			SDM (OH)			
				SATUAN	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	RENCAN A	REALISA SI	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	743,00	3.324,00	447,38							
		1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	290.477,00	627.606,00	216,06							
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.000,00	25.019.096,16	92.663,32							
								396.922.000,00	396.166.789,00	99,81 %	4125,75	3727	90,34 %	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	% (Persen)	85,00	100,00	117,65							
		2.2	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	2,00	100,00							
		2.3	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	% (Persen)	80,00	100,00	125,00							
								2.276.707.000,00	2.274.251.007,00	99,89 %	6868	5964	86,84 %	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11,00	12,00	109,09							
		3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2,00	3,00	150,00							

		3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	38,00	52,00	136,84						
		3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	3,00	3,00	100,00						
								100.147.000,00	99.725.674,00	99,58 %	1674	1303	77,84 %
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	% (Persen)	100,00	100,00	100,00						
		4.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	% (Persen)	80,00	100,00	125,00						
		4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	2,00	1,00	50,00						
		4.4	Jumlah Pemda menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1,00	1,00	100,00						
								1.231.495.000,00	1.229.981.553,00	99,88 %	9890,5	9356,5	94,60 %
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00						
		5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Pemkab/ Kota	7,00	6,00	85,71						
		5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >=Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00						
		5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >=Level 3	Pemkab/ Kota	12,00	12,00	100,00						

		5.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI >=Level 3	Pemkab/ Kota	3,00	1,00	33,33						
		5.6	Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	4,00	3,00	75,00						
		5.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20,00	20,00	100,00						
		5.8	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20,00	29,00	145,00						
		5.9	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	1,00	1,00	100,00						
		5.10	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	2,00	2,00	100,00						
								341.523.000,00	340.735.002,00	99,77 %	1208,25	1117	92,45 %
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	84,60	112,80						
		6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	87,75	107,01						
		6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	% (Persen)	70,00	100,00	142,86						
		6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	% (Persen)	100,00	100,00	100,00						
		6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	92,25	123,00						
		6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	96,33	101,40						

		6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	95,06	118,83						
								20.122.400.000,00	19.831.930.622,00	98,56 %	7584	7584	100,00 %



PERBANDINGAN KINERJA *OUTCOME*

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KINERJA IKK										
		SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2021	Naik (turun)	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021	Naik (turun)	TARGET 2024	% REALISASI DARI TAHUN 2024		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.324,00	73754	- 70.430,00	444,37	14.238,22	-13.793,85	309731	1,07
		1.2	Milai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	627.606,00	388.191,49	239.414,51	245,18	208,09	37,09	1.041.915,00	60,24%
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	25.019.096,16	25.377,28	24.993.718,88	357.536,47	1.626,73	355.909,74	3.281.056,00	761,81
					23.721,27	36.541,65	-12.820,38	118,55%	2342,41%	NA	NA	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	% (Persen)	100,00	NA	NA	117,65	NA	NA	85,00	117,65%
		2.2	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	0	1	100	NA	100	NA	NA
		2.3	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	0	100,00	125,00	NA	125,00	NA	NA
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	12	11	1	110%	109,09%	-0,91%	12	100%
		3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	3	1	2	100%	150%	50%	2	150%
		3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	52	47	5	188%	136,84%	-51,16%	53	99,11%
		3.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	3	NA	NA	3	100%	NA	NA	NA
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	% (Persen)	100,00	100,00	0	100,00	100	-9,900	100,00	100,00%

	Pengendalian Korupsi	4.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	% (Persen)	100,00	88,89	11,11	125,00	88,89	36,00	90,00	111,11%
		4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Pemda	1	NA	NA	50%	NA	NA	4	25,00%
		4.4	Jumlah Pemda menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1	1	0	100%	1	0	NA	NA
		5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Pemkab/Kota	6	5	1	50%	NA	NA		
		5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >=Level 3	Provinsi	1	1	0	100	100	0	94,13	98,06
		5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >=Level 3	Pemkab/Kota	12	12	0	100	100	0	94,13	98,06
		5.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI >=Level 3	Pemkab/Kota	3	0	3,00	75	0	75	69,5	14,28
		5.6	Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	3	3	-	100	21,43	78,57	-	-
		5.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA
		5.8	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	29	8	21,00	145	160	-15	NA	NA
		5.9	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	1	NA	NA	NA	100%	NA	3	33,33%
		5.10	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	2	NA	NA	NA	100%	NA	4	50%
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	6,1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	84,60	87,03	2,43	112,80	116,04	3,24	79	93,38%
		6,2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	87,75	81,56	6,19	107,01	101,95	5,06	94	107,12%
		6,3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	% (Persen)	77,19	100,00	22,81	110,27	153,85	43,58		

	6,4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	% (Persen)	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-		
	6,5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	92,25	92,00	0,25	126,74	122,67	4,07	81	87,80%
	6,6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	96,33	96,96	0,63	101,40	102,06	0,66	90	93,43%
	6,7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	104,72	89,36	15,36	143,99	111,7	32,29		



TARGET DAN REALISASI CAPAIAN OUTPUT

SASARAN KEGIATAN	RERAT A CAPAIAN SASTRA A 2	RINCIAN OUTPUT (RO)	KINERJA RO				ANGGARAN			SDM			EFISIENSI DANA		EFISIENSI SDM	
			SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisiensi (7≥10)	Belum Efisiensi (7<10)	Efisiensi (7≥13)	Belum Efisiensi (7<13)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10 = 9/8	11	12	13 = 12/11	14	15	16	17
1	Meningkatkannya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	SHP	2	3	150	77,538,000,00	77,157,480,00	99,51%	1164,5	1110	95,32%	Efisien	-	Efisien	-
		Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	SHP	7	14	200	140,974,000,00	140,781,180,00	99,86%	2618,25	2294	87,62%	Efisien	-	Efisien	-
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	SHP	2	3	150	178,410,000,00	178,228,129,00	99,90%	343	323	94,17%	Efisien	-	Efisien	-
Jumlah SK 1				11	20	500	396,922,000,00	396,166,789,00	99,81%	4125,75	3727	90,34%				
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	SHP	36	45	125	2,261,248,000,00	2,258,875,407,00	99,90%	5716	5385	94,21%	Efisien	-	Efisien	-
		Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan,	SHP	1	1	100	15,459,000,00	15,375,600,00	99,46%	1152	579	50,26%	Efisien	-	Efisien	-

			dan Tindak Lanjut														
Jumlah SK 2				37	46	225	2,276,707,000,00	2,274,251,007,00	99,89 %	6868	5964	86,84%					
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha		Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	SHP	1	2	200	73,445,000,00	73,036,464,00	99,44 %	64	64	100,00%	Efisien	-	Efisien	-
			Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	SHP	1	2	200	26,702,000,00	26,689,210,00	99,95 %	1610	1239	76,96%	Efisien	-	Efisien	-
Jumlah SK 3				2	4	400	100,147,000,00	99,725,674,00	99,58 %	1674	1303	77,84%					
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi		Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	SHP	19	26	136,84	1,153,031,000,00	1,152,496,553,00	99,95 %	9429,5	8895,5	94,34%	Efisien	-	Efisien	-
			Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Korupsi	SHP	1	2	200	78,464,000,00	77,485,000,00	98,75 %	461	461	100,00%	Efisien	-	Efisien	-
Jumlah SK 4				20	28	336,84	1,231,495,000,00	1,229,981,553,00	99,88 %	9890,5	9356,5	94,60%					
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU		Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	SHP	2	3	150	313,278,000,00	312,544,842,00	99,77 %	1107,25	1017	91,85%	Efisien	-	Efisien	-
			Rekomendasi hasil pengawasan	SHP	1	2	200	28,245,000,00	28,190,160,00	99,81 %	101	100	99,01%	Efisien	-	Efisien	-

			pengembang an JFA														
Jumlah SK 5				3	5	350	341,523,000,00	340,735,002,00	99,77 %	1208,25	1117	92,45%					
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja		Layanan Umum	Layana n	1	1	100	493,710,000,00	493,710,000,00	100,00 %							
			Layanan Perkantoran	Layana n	1	1	100	18,663,190,000,00	18,374,267,322,00	98,45 %							
			Layanan Sarana Internal	Unit	12	12	100	420,000,000,00	418,929,300,00	99,75 %							
			Layanan Prasarana Internal	Unit	3	3	100	545,500,000,00	545,024,000,00	99,91 %							
Jumlah SK 5				17	17	400	20,122,400,000,00	19,831,930,622,00	98,56 %	7584	7584	100,00%	Efisien		Efisien		



PROYEK STRATEGIS NASIONAL

No	Kode Cluster	Nama Cluster	Kode PSN	Nama PSN	Indikator	Target	Realisasi	Rendal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E	Sektor Kawasan	E,101	Kawasan Industri Jorong	Fisik Pekerjaan	915	0	D103
2	G	Bendungan dan Irigasi	G,127	Bendungan Tapin	Fisik Pekerjaan	566,9	566,88	D103
3	II	Program Pemerataan Ekonomi	II,2	Reforma Agraria - Kanwil BPN Kalimantan Selatan	Bidang	6164	6164	D103

BADAN USAHA DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA “BAIK”

No	Nama BUMN/Anak Perusahaan	ICORPAC			GCG		Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI			IEPK		
		Skor	Huruf	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar	-	-	-	-	-	3,21	3	Terdefinisi	-	-	-	-	-	-
2.	RSUD H, Boejasin Kabupaten Tanah Laut	-	-	-	-	-	3,02	3	Terdefinisi	-	-	-	-	-	-
3.	PDAM Bandarmasih	-	-	-	-	-	3,36	3	Terdefinisi	-	-	-	-	-	-

No	Nama BUMD	Indikator Kementerian PUPR		Indikator Kemendagri		Manajemen Risiko			Indikator Perdep BPKP	
		Skor	Tingkat Kesehatan	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6
1	PDAM Bandarmasih	2,99	Sehat	69,09	Baik	3,36	3	Terdefinisi		
2	PDAM Intan Banjar	2,99	Sehat	64,91	Baik	-	-	-		
3	PDAM Barito Kuala	2,84	Sehat	56,65	Cukup		-	-		
4	PDAM Tanah Laut	3,31	Sehat	56,76	Cukup		-	-		
5	PDAM Kotabaru	3,14	Sehat	59,21	Cukup		-	-		
6	PDAM Tanah Bumbu	2,9	Sehat	62,53	Baik		-	-		
7	PDAM Tapin	3,28	Sehat	54,61	Cukup		-	-		
8	PDAM Hulu Sungai Selatan	3,46	Sehat	64,75	Baik		-	-		
9	PDAM Hulu Sungai Utara	2,9	Sehat	64,3	Baik		-	-		
10	PDAM Balangan	2,85	Sehat	61,81	Baik		-	-		
11	PDAM Tabalong	3,47	Sehat	66,86	Baik		-	-		
12	PD Pasar Bauntung Batuah								65,7	Sehat “A”

